

Wawancara dengan Dr. Tholhah Hasan

Ketaatan Rakyat Tergantung Keadilan Pemerintah

Konsep rakyat dalam Islam itu bagaimana?

Kalau kita mengacu kepada literatur keislaman, khususnya yang ada kaitannya dengan politik, sebetulnya istilah rakyat, yang dalam bahasa Arab *ra'iyah*, sudah dikemukakan sejak zaman Rasul. Nabi sendiri sudah menyampaikan istilah itu melalui hadis: *kullukum ra'in wakullukum mas'ulun 'an ra'iyatibi*. Dari sabda Nabi itu bisa kita ambil

pengertian bahwa rakyat adalah sekelompok orang yang mengakui kepemimpinan dan kekuasaan pemimpinnya. Pada waktu itu, kepemimpinan yang diakui oleh masyarakat adalah kepemimpinan yang bisa dianggap mempunyai kekuasaan politik. Bisa mengatur, memerintah, dan mendapatkan semacam mandat. Apakah mandat itu dari rakyat atau dari yang lainnya, itu masalah lain. Tetapi komunitas tersebut mengakui bahwa seorang pemimpin adalah orang yang mempunyai kekuasaan dan mereka harus mentaati perintah-perintahnya. Sebaliknya, pemimpin diharuskan



memiliki tanggung jawab pada sekelompok orang yang dipimpinnya.

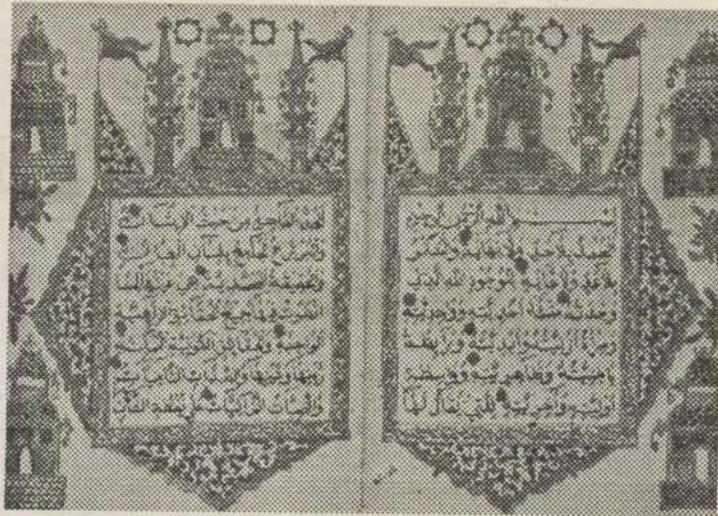
Anda mengatakan bahwa rakyat adalah sekelompok orang yang mengakui kekuasaan pemerintah dan mentaatinya. Lalu pengertian pemerintah yang harus diakui dan ditaati menurut konsep Islam bagaimana?

Di dalam fikih Islam, suatu pemerintahan yang diakui mempunyai kekuasaan adalah yang memang disetujui oleh rakyatnya melalui suatu proses keterlibatan rakyat di dalam menegakkan pemerintahan itu. Dalam Islam pemerintahan harus melibatkan rakyat dan memperoleh kepercayaan atau dukungan dari rakyat melalui konsep *bai'at*. *Bai'at* pada dasarnya adalah pengangkatan atau dukungan atas seorang pemimpin pemerintahan. Oleh karena itu orang yang didukung harus mempunyai syarat-syarat umum yang disetujui oleh rakyat secara langsung atau melalui representasi-representasi yang mereka

buat. Yang di dalam istilah fikih Islam klasik dinamakan *ahlul halli wal 'aqdi*.

Oleh karena itu, di dalam penegakan pemerintahan, ada orang yang dipilih sebagai pemimpin dan diberi kekuasaan, dengan persyaratan ia dianggap memiliki kelayakan untuk dipilih, dan juga ada ketentuan persyaratan bagi siapa yang dianggap mewakili masyarakat untuk duduk dalam *ahlul halli wal 'aqdi*. Barangkali *ahlul halli wal 'aqdi* ini yang untuk perkembangan selanjutnya menjadi lembaga perwakilan rakyat.

Di dalam konsep Islam, ada pemilihan dan juga ada penunjukan. Tetapi kecenderungan pemilihan lebih besar daripada penunjukan. Ini dibuktikan di awal-awal Islam sendiri. Ada juga kemudian sistem penunjukan dengan *ta'yin* pada saat pemerintah sudah berubah dari bentuk kekhalifahan menjadi kerajaan sejak masa Mu'awiyah. Tapi ada yang harus dicatat bahwa baik yang melalui proses pemilihan (*ikhtiyar*), maupun *ta'yin* tetap ada aturan Islam berupa *bai'at*. *Bai'at* sebetulnya merupakan suatu bentuk penyampaian dukungan, kepercayaan dan ketaatan. Dalam literatur Islam klasik *bai'at* merupakan salah satu keharusan dalam proses penegakan suatu pemerintahan. Tanpa terdapat *bai'at* dari mayoritas rakyat maka suatu pemerintahan menjadi tidak legitimed menurut Islam. Oleh karena itu, bagi penguasa, jika ada rakyat yang tidak mau *bai'at* dianggap sebagai oposisi bahkan dianggap sebagai penentangan. Sejak zaman dulu, sebetulnya, sikap tidak menyetujui pemerintahan tertentu sudah ada dan bentuknya tidak ikut *bai'at*.



Sikap tidak mau *bai'at* atau yang lebih populer disebut oposisi, secara moral atau hukum Islam dibenarkan atau tidak?

Selama ia tidak menimbulkan fitnah yang dalam pengertian politik berarti kekacauan

dan pemberontakan, bisa ditolerir. Contohnya, pada waktu Abu Bakar sudah *bai'at*, beberapa saat setelah itu, kelompok *ahlul bait* tidak memberikan *bai'at* tapi mereka tidak dikenakan sanksi. Hal yang sama terjadi pada khalifah yang lain. Jika sudah menimbulkan aksi yang bukan sekedar tidak mau *bai'at*, tetapi melawan pemerintah yang dianggap sah, lalu pemerintah menindak para oposisi. Jika oposisinya itu masih dalam bentuk pendapat, terbatas pada tidak mau *bai'at* itu masih dibiarkan.

Dalam kasus-kasus kontemporer ada mekanisme semacam mosi ketidakpercayaan yang pada hakekatnya sama dengan pemberontakan sebab muaranya adalah pengambilalihan kekuasaan. Mengenai ini bagaimana?

Kalau mosi ketidakpercayaan dalam arti memberikan koreksi, sebetulnya tidak berarti melawan keabsahan pemerintah. Contohnya, pada saat khalifah 'Utsman mendapat reaksi masyarakat terhadap kebijakannya mengganti gubernur Kufah, Sa'd bin Abi Waqqas yang diangkat oleh 'Umar. Sa'd adalah orang jujur, memang kaya sejak awal tapi bukan hasil KKN, dan dia paling tidak senang diajak KKN. Para elit politik yang ada di Kufah banyak yang

menghendaki untuk berkolusi dengan gubernur sebagaimana terjadi di Syiria, Syam yang saat itu gubernurnya adalah Mu'awiyah. Dengan demikian banyak orang yang menghendaki dan mengusulkan kepada Utsman agar Sa'd bin Abi Waqqas diganti. Akhirnya, Sa'd diganti dengan Walid bin 'Uthbah. Dia masih ada hubungan famili dengan khalifah dan dia ternyata orang yang bisa diajak untuk berkolusi. Pada waktu itu yang menjadi pejabat bendahara negara bagian Kuffah adalah 'Abdullah bin Mas'ud. Beliau memberi laporan kepada sahabat 'Utsman apa yang dilakukan oleh Walid tidak benar dan 'Abdullah bin Mas'ud sendiri tidak mau menerima atas pergantian orang sebaik Sa'd dengan gubernur yang seperti Walid bin 'Uthbah. Namun pemerintah pusat masih mempertahankan gubernur baru itu. Akhirnya, Abdullah bin mas'ud mengundurkan diri dari jabatan bendahara. Ini adalah bentuk reaksi keluar dari sistem yang berarti penolakan terhadap sistem.

Tetapi lain dengan yang dilakukan masyarakat di Syiria yang dipimpin oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Mereka mengadakan rapat terbuka, orasi politik dan mengajukan kritik tajam kepada pemerintah dan juga membentuk kelompok-kelompok yang menentang cara hidup mewah dengan disertai pelanggaran syara' yang dilakukan oleh elit politik di Syiria. Ini merupakan perlawanan Abu Dzar terhadap Mu'awiyah. Jadi sudah ada ketidakpercayaan dari Abu Dzar dengan kelompoknya yang diungkapkan dengan protes massal dan terbuka, semacam demo reformasi kemarin ini. Dan akhirnya Abu Dzar dipanggil dan diminta untuk bisa meredam gerakan-gerakannya itu dengan janji bahwa gubernur akan meninggalkan perbuatan yang jelek. Ternyata hal ini tidak dipenuhi Mu'awiyah, dia tetap dengan gayanya itu dan Abu Dzar berontak lagi. Akhirnya Abu Dzar dipanggil ke pemerintah pusat dan di diasingkan ke Abzah hingga meninggal di sana. Dia adalah tahanan politik pertama dan meninggal di penjara. Melihat kenyataan ini berarti sudah ada yang namanya mosi tidak percaya.

Lain lagi yang dilakukan oleh 'Amar bin Yasir, dia tidak membuat orasi secara terbuka, tapi mengirim surat kepada orang-orang yang dianggap berpengaruh tentang ketidakberesan pemerintahan. Akhirnya dia ditangkap oleh aparat dan dipukuli hingga A'isyah turun tangan dan memprotes khalifah 'Utsman atas tindakan terhadap orang yang menyatakan pendapat yang tidak sama dengan pemerintah. Seandainya saat itu reaksi-reaksi tersebut ditanggapi dan akomodir dengan baik, saya kira tidak akan terjadi pemberontakan. Dan sikap anti kritik ini terjadi pada kekuasaan bani 'Umayyah maupun Bani 'Abasyiyah.

Di kalangan umat Islam terdapat perbedaan pendapat. Ada yang memilih menerima realitas yang tidak baik, kalau toh ada reaksi, terbatas dengan memberi nasehat seperti pemikiran al-Mawardi dan al-Ghazali. Ada juga yang tidak mau menerima pemikiran demikian. Pendukung sikap kedua, bersikap memilih melawan jika memang pemerintah tidak benar. Abu Hanifah sendiri memiliki dua pendapat. Pernah suatu saat ia menyetujui suatu bentuk oposisi damai, dan pada suatu saat terjadi pemberontakan dia juga membackup gerakan itu. Mungkin dia melihat kadar penyelewengan yang dilakukan pemerintah. Jika penyelewengan tersebut sudah dianggap tidak bisa ditolerir lagi, maka reaksinya tidak sekedar protes damai tetapi harus bersifat melawan, memberontak.

Sedangkan di kalangan pemikiran para fuqaha ada yang menyetujui protes damai yang sekedar memberikan nasehat tapi ada yang menyetujui protes yang lebih dari itu. Sekarang, ulama'-ulama' fikih yang tertarik masalah politik lebih cenderung memilih sikap yang kedua. Contohnya, Prof. Mubarak, dia setuju dengan oposisi yang lebih keras lagi.

Mungkin itu antitesa dari sebagian besar pengalaman sejarah Sunni khususnya, yang oposisinya adalah oposisi lembek.

Jika ada orang yang mengatakan bahwa Sunni itu lebih berorientasi pada stabilitas, tidak suka pada adanya ketegangan-ketegangan, sebenarnya tidak sebetulnya benar. Sejarah membuktikan bahwa banyak gerakan oposisi bahkan pemberontakan yang mendapatkan dukungan ulama misalnya Abu Dzar, Abu Hanifah dan sebagainya.

Pada masa khulafaurrasyidin ada bentuk pengangkatan yang diwakili oleh tokoh-tokoh yang diyakini merupakan representasi suara masyarakat Madinah, meskipun mereka tidak dipilih langsung oleh rakyat. Kalau kita bandingkan dengan model perwakilan yang ada di Indonesia kan hampir sama. Tapi yang terjadi di negeri kita kok sangat tidak mencerminkan aspirasi rakyat, lalu apa yang salah?

Begini, sebagai contoh, pada zaman penunjukan "Utsman sebetulnya ada dua model; ada orang-orang yang ditunjuk untuk memilih seseorang untuk menjadi khalifah dan ada model lain yang dilakukan oleh 'Abdullah bin 'Auf dengan mencoba membuat angket atau jajak pendapat tentang siapa yang cocok untuk menjadi khalifah. Dan kebetulan antara hasil pemilihan dan hasil *pooling* sama. Contoh yang lain, Nabi pernah memanggil para wakil yang betul-betul representasi pada saat mau membicarakan soal pembebasan berbagai jenis *fai'* (harta rampasan). Karena Nabi tidak mungkin mengambil pendapat semua penduduk Madinah, maka Nabi memerintahkan kepada para wakil kelompok masyarakat (*'urafa*) untuk bermusyawarah dengan kelompoknya, dan sesudah itu Nabi cukup berbicara dengan para *'urafa* itu.

Sebetulnya, sejak dulu ada tiga bentuk pengambilan pendapat rakyat: ada yang melalui wakil yang ditunjuk dari atas, ada yang melalui wakil yang dipilih oleh masyarakat dan ada pula rakyat secara langsung memberikan suaranya. Saya

kira sistem perwakilan moderen yang kita anut sekarang ini merupakan perwakilan yang dipilih oleh rakyat. Akan tetapi pada pelaksanaannya terdapat berbagai distorsi sejak awal. Sejak sistem kepartaian, hingga soal posisi legislatif yang berada dalam dominasi pemerintah.

Salah satu syarat kepemimpinan yang ditawarkan oleh Al-Baqillani adalah adanya kekuatan atau *syaukah*. Sejauh mana *syaukah* ini diperlukan dan sejauh mana ia harus dikurangi?

Dalam Islam, semua hal yang berkaitan dengan politik Islam tidak bisa lepas dari *mashalihul ammah* atau *mashlahah*. Kalau kita baca bukunya 'Izzuddin bin Salaf seorang intelektual muslim, mengatakan bahwa seluruh kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah jangan sampai tidak dikaitkan dengan pertimbangan apakah mendukung maslahat atau tidak. Tujuan mendirikan pemerintahan sendiri sebenarnya ada dua yaitu: untuk menegakkan agama Tuhan dan untuk kesejahteraan masyarakat. Dua hal inilah yang dijadikan rujukan dalam seluruh perilaku pemerintahan termasuk dalam menentukan kadar *syaukah* yang dimilikinya. Misalnya, pengerahan kekuatan pemerintah dibatasi dalam keadaan yang perlu saja. Katakanlah kekuatan militer diperlukan dalam keadaan perang dan kalau dalam keadaan damai saya kira kekuatan militer perlu dibatasi.

Hal ini menjadi penting ketika kita melihat kenyataan bahwa dalam rezim Orde Baru negara merupakan kekuatan yang tidak tertandingi. Negara mampu untuk memaksakan kehendak apapun terhadap rakyatnya.

Saya kira kita tidak bisa menyetujui hal semacam itu. Sebab dalam kasus ini yang mendapat kemaslahatan adalah pemerintahnya bukan rakyatnya. Ada keterbalikan arus. Rakyat yang

semestinya mendapat imbalan jaminan kemaslahatan dari pemerintah, tetapi justru demi keuntungan penguasa, kemaslahatan rakyat direduksi oleh pemerintah. Akibatnya, hak-hak masyarakat melemah kemudian hak-hak kekuasaan menjadi dominan. Hal ini bisa kita lihat setiap ada benturan antara kepentingan pemerintah dan masyarakat, kepentingan pemerintah yang dilindungi dan dimenangkan. Itu berarti kekuatan pemerintah sangat dominan dan masyarakat tidak berdaya. Seolah-olah masyarakat bukan menjadi bagian dari pertimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan pemerintah

Untuk mewujudkan keseimbangan antara kekuatan masyarakat dan negara orang mengharapkan adanya masyarakat sipil atau *civil society*. Menurut Anda?

Saya kira gerakan masyarakat sipil atau masyarakat *madani* merupakan salah satu produk dari kekuasaan pemerintah yang cenderung dominan. Peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah sebetulnya cenderung memupuk dominasi pemerintahan dan memeperlemah kekuasaan rakyat. Saya kira di beberapa negara maju hampir selalu mengalami hal-hal yang demikian. Produk-produk perundang-undangan, konstitusi yang dihasilkan selalu menguntungkan pemerintah, tidak menguntungkan rakyat. Protes-protes moral dari semua itu saya kira yang mendorong lahirnya masyarakat *madani* dimana masyarakat mempunyai kekuatan sendiri yang tidak dianugerahkan oleh pemerintah kepada mereka. Sehingga mereka mencari legitimasi bahwa mereka mempunyai kekuatan sendiri baik itu melalui gerakan politik, gerakan ekonomi, gerakan moral, gerakan media massa, gerakan intelektual dan lainnya. Semua itu merupakan gerakan-gerakan yang dimunculkan untuk membangun keberdayaan masyarakat. Sehingga timbul pemikiran bahwa tidak hanya pemerintah saja yang bisa mengurus masyarakat, bukan cuma dia yang



memiliki kekuatan.

Akhir-akhir ini kita dibuat prihatin oleh munculnya sekelompok kaum intelektual termasuk para kiai yang justru cenderung memperkuat dominasi pemerintah.

Kita harus sama-sama prihatin, karena para kaum intelektual terlebih lagi ulama merupakan kekuatan pada masyarakat. Mereka sebetulnya merupakan tempat pengaduan masyarakat, mereka yang berkewajiban merumuskan aspirasi-aspirasi masyarakat, mereka yang membela kepentingan masyarakat. Bahkan pada masa lalu tidak jarang mereka yang memimpin gerakan dalam menghadapi kolonial. Sehingga keberadaan ulama di tengah-tengah masyarakat itu dapat merupakan kekuatan yang dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat. Peranan ulama untuk merumuskan aspirasi, membela, memimpin gerakan, saat ini justru sangat menurun sekali. Sebab ulama' sekarang lebih senang kalau mereka

hidup di tengah-tengah kekuasaan. Jadi ini sudah menyangkut soal moral.

Jadi bukan hanya soal sistem tapi juga moral?

Iya, bukan itu saja tapi moral. Saya kira, hal ini terjadi disamping memang telah dikondisikan oleh pemerintah, juga ada kemungkinan terdapat kesadaran di antara sementara ulama bahwa mereka sudah kurang mempunyai kredibilitas dalam masyarakatnya karena kewibawaan yang dimiliki oleh ulama dahulu, sekarang tidak lagi dimiliki oleh mereka. Sehingga karena kurang memiliki kewibawaan maka untuk menutup kekurangan ini mereka mencari pengakuan dari masyarakat melalui kedekatan dengan penguasa. Soal sebab terjadinya penurunan kewibawaan, mungkin karena keilmuannya yang kurang memadai, atau ilmunya tidak menurun, tapi kualitas masyarakatnya meningkat dan tuntutan mereka lebih banyak, dan semakin kritis sehingga ulama kurang bisa mengimbanginya, sehingga masyarakat tidak begitu merasa bergantung pada peran ulama itu sendiri.

Pada forum pertemuan berbagai LSM di Jakarta bulan lalu, dibahas civil society dan di sana muncul pendapat, pendapat itu dominan, bahwa masyarakat pesantren bisa disebut embrio dari terwujudnya masyarakat sipil. Menurut Anda?

Dengan adanya kemandirian yang sampai saat ini terasa di kalangan masyarakat pesantren, saya kira, pendapat itu ada benarnya. Adanya sikap yang mandiri, tidak bergantung kepada pemerintah adalah wujud dari *civil society*. Tetapi sikap-sikap yang demikian itu kadang-kadang mengalami kemandulan dan tidak dapat dikembangkan. Kalau boleh saya katakan bahwa masyarakat pesantren jika dilihat dari sisi *civil society* memang potensial tetapi tidak aktual. Contoh saja, sedemikian mudahnya pesantren menerima tawaran-tawaran dari para pejabat dan akhirnya justru mengurangi

kekuatan dia sendiri.

Salah satu ciri masyarakat sipil adalah kesetaraan dan pertanggungjawaban secara bersama-sama. Bila kita amati hubungan kemanusiaan dalam kehidupan pesantren terasa ada ganjalan...

Betul ada. Kesetaraan masyarakat pesantren ada sebatas kesetaraan antar santri. Tapi antara santri dengan elit pesantren tidak setara. Contoh, sepintar, sealip apapun seorang santri kalau dihadapkan pada *gus*, tiarap dia. Itu terjadi dalam banyak hal bukan hanya pada masalah sosial. Tidak ada kesetaraan antara santri dengan elit pesantren. Siapa yang salah saya *nggak ngerti*. Ungkapan kasarnya terdapat sikap-sikap feodalisme yang berakibat panjang hingga di organisasinya. Di NU terjadi hal yang sama baik dalam soal pemilihan kepemimpinan, pengambilan keputusan, rekrutmen kader dan sebagainya.

Apakah sudah ada tanda-tanda terjadinya perubahan pola hubungan antara kelompok elit pesantren dengan yang bukan?

Itu semua tergantung dari kiainya. Ada kiai yang menginginkan tidak adanya *gap* antara keluarga kiai dengan warga pesantren. Pesantren Tebuireng, tidak membuat jarak-jarak. Perlakuan khusus terhadap *gus* memang ada tapi tidak begitu mencolok. Ada juga yang sengaja mebedakan diri dengan santri, semua tergantung pada katakanlah *kiai good will*.

Selain kesetaraan, ciri lain adalah nonsektarian, ada kemauan dan kemampuan untuk melakukan kerjasama dengan kelompok manapun dan mau menerima orang lain setara dengan dirinya sendiri. Bagaimana dengan masyarakat pesantren?

Masyarakat pesantren masih belum bisa secara penuh membuktikan dirinya non-sektarian. Sebab

mereka masih menganggap bahwa dalam lingkungan masyarakat ada "orang dalam" dan "orang luar", ada *outsider* dan ada *insider*, padahal pandangan seperti ini kadang-kadang merambah kepada sikap sosial. Sikap sosialnya berbeda antara pada saat mensikapi masyarakat santri dan pada saat mensikapi masyarakat yang bukan santri. Sebenarnya saya berharap banyak peran aktif Rabithah Ma'ahid untuk tidak hanya mengokohkan lingkungan eksklusif, tapi justru berupaya agar kekuatan pondok bisa ikut menanamkan sikap-sikap yang non-sektarian. Tapi dalam tingkat kalangan pemimpin pesantren sudah cukup banyak usaha-usaha kearah itu.

Dalam upaya perimbangan masyarakat *vis a vis* negara, di samping masyarakat juga melakukan pemberdayaan diri mereka sendiri, pemerintah tentu diharapkan ikut serta mempercepat munculnya masyarakat yang kuat. Moral politik pemerintah yang bagaimana yang dibutuhkan?

Upaya itu membutuhkan kebesaran hati pemerintah untuk membuat lembaga legislatif bisa berperan secara baik, lembaga yudikatif bisa berperan secara mandiri. Saya kira itu akan banyak artinya. Untuk membuat lembaga legislatif yang kuat, aspiratif, dan kritis tidak lepas dari faktor sistem dan kualitas anggotanya. Kalau sistem saja yang diperbaiki, misalnya sudah tidak ada campur tangan pemerintah, sedangkan anggotanya kurang memadai, maka tidak akan ada perbaikan yang signifikan. Sekarang ini anggota legislatif banyak yang tidak mengerti tentang aspirasi rakyat dan banyak juga yang tidak mau mengerti. Di samping banyak yang memang lebih bodoh dari rakyatnya, ada pula yang memang pintar tapi komitmen moralnya tipis. Menurut saya untuk memberdayakan masyarakat ada tiga hal yang harus dicapai secara bersama-sama. Pertama, harus meningkatkan kuaalitas masyarakat melalui pendidikan. Kedua, mengefektifkan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Dan yang ketiga,

bagaimana dapat memperbaiki sistem yang terkait erat dengan masyarakat.

Bagaimana model hubungan yang ideal antara rakyat sebagai umat dan negara sebagai pemimpin menurut pesan Islam?

Menurut saya, karena banyak berinteraksi dengan berbagai nilai-nilai tradisional pesantren dan katakanlah kajian-kajian kami tidak pernah lepas dari bingkai-bingkai keislaman, saya kira filosofi surat annisa' ayat 58-59 harus diterapkan secara bersama-sama. Pertama, dari fihak pemerintah memegang *innallaha ya'murukum an tuaddul amanati ila ahliha waidza bakamtum bainannas an tabkumu bil'adl*. Amanah dan 'adalah pihak pemerintah harus betul-betul dijaga. Saya kira berangkat dari situ rakyat akan bisa melakukan kepatuhan. Perintah *athi'ullaha waathi'ul rasul waulil amri minkum* yakni perintah taat kepada pemerintah setelah taat kepada Allah dan Rasul sebenarnya bersandar kepada asumsi adanya keadilan yang datangnya dari pemerintah, secara *bottom up*.

Dengan demikian, seberapa besarnya ketaatan kita, tergantung kepada sejauh mana kita merasakan keadilan yang diberikan oleh pemerintah. Saya kira, ketaatan para sahabat kepada Rasul, bukan karena Rasul punya *syaukah*, tetapi karena mereka melihat Rasul melaksanakan amanahnya dengan adil. Suatu ketika Umar menangis, ia mengingat bagaimana Rasul mengangkat mereka yang sebelumnya melarat menjadi makmur, dari tertindas menjadi hidup merdeka tetapi keadaan Rasul tetap miskin. Mereka merasa diperlakukan secara adil, tugas-tugas pemerintahan dilakukan dengan benar sehingga timbullah rasa taat dan patuh. Kenapa sekarang rakyat kita berontak? Karena tidak merasa dekat dan diperlakukan tidak adil. Amanah-amanah rakyat yang diberikan kepada pemerintah tidak dilaksanakan dengan baik. Sementara kita dipaksa terus untuk patuh, harus percaya, harus berdidikasi tinggi dan sebagainya. Ini lelucon. ❖❖